

ABSTRAK

Khoirunnisa Mahabatulloh, 1218010096, 2025: Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2019-2023

Implementasi pengelolaan informasi dan dokumentasi terus digencarkan di era saat ini karena sebagai upaya dalam mencapai transparansi atau keterbukaan informasi publik. Kondisi ini menuntut KPU Kota Bandung untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Namun faktor sumber daya menjadi kendala dalam implementasi kebijakan sehingga menghambat proses pengelolaan informasi dan dokumentasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di KPU Kota Bandung sesuai Undang-Undang No 14 tahun 2008 dengan teori implementasi kebijakan dari George C Edward III.

Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan yang melibatkan empat dimensi faktor pemengaruh dalam pengimplementasian kebijakan oleh suatu lembaga. Penelitian ini menganalisis apakah penerapan teori implementasi kebijakan Edward III dapat digunakan sebagai pendekatan dalam mempengaruhi proses pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di KPU Kota Bandung untuk mencapai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat Kota Bandung.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dengan informan, dan dokumentasi terkait. Teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta verifikasi kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif dan berjalan dengan baik dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi di KPU Kota Bandung. Meskipun terdapat program dan teknis yang dirancang dengan baik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat atas upaya menyediakan informasi, implementasinya menghadapi kendala seperti sumber daya manusia yang masih belum dapat diatasi seperti kurang kompeten dan kapabilitas terhadap kebutuhan digitalisasi. Kemudian terkait mekanisme pelayanan informasi publik yang kurang efektif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya mengembangkan strategi *hybrid* dalam pelayanan informasi publik dengan tetap menyediakan prosedur digital perlu mengoptimalkan kolaborasi internal yang sudah berjalan baik agar alur informasi tetap efisien saat ini.

Kata kunci: Pengelolaan Informasi, Implementasi Kebijakan, KPU Kota Bandung